

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah**

Oleh :

Ellemmia Lorenza Pradana

NPM : 1621020042

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah**

Oleh :

Ellemmia Lorenza Pradana

NPM : 1621020042

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berpartisipasi dan berinteraksi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak politik dan didaftarkan sebagai pemilih tetap pemilu. Namun, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bahkan mempermasalahkan suara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu serentak 2019 dan hingga saat ini masih diperbincangkan, karena masyarakat masih ragu apakah seorang penyandang disabilitas mental dapat menyalurkan hak pilihnya secara baik dan benar. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental dalam Pasal 13 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam UU tersebut dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental dalam UU tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan di lapangan atau pada responden yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena. Data-data yang didapat akan diambil sebagai rujukan dan dianalisa untuk menunjang pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang menyebabkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental masih belum sepenuhnya terealisasi karena hanya penyandang disabilitas mental yang keadaan jiwanya sedang tenang atau dalam keadaan baik yang dapat menyalurkan hak pilihnya. Tinjauan fiqh siyasah terhadap

pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesawaran sesuai prinsip dan kaidah fiqh siyasah dengan tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan berdasarkan kedudukan, kebudayaan, ras serta status sosial. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas mental sama dengan manusia lain dimata Allah SWT dan dimata hukum. Namun penyandang disabilitas dibolehkan untuk ikut serta dalam pemilu apabila sedang dalam keadaan baik tidak terganggu jiwannya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellemmia Lorenza Pradana

NPM : 1621020042

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Mental (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2021

Yang menyatakan,



Ellemmia Lorenza Pradana
NPM.1621020042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

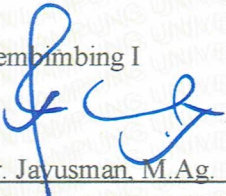
PERSETUJUAN

Nama : Ellemmia Lorenza Pradana
NPM : 1621020042
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran")

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Jayusman, M.Ag.

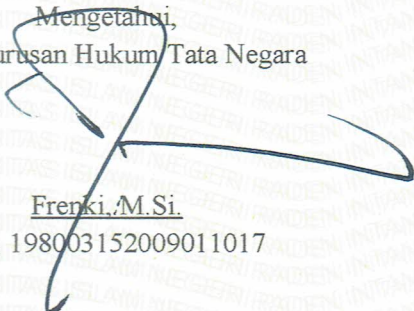
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh : **Ellemmia Lorenza Pradana NPM : 1621020042** Program Studi : **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Syariah)** , telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Sekretaris : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah



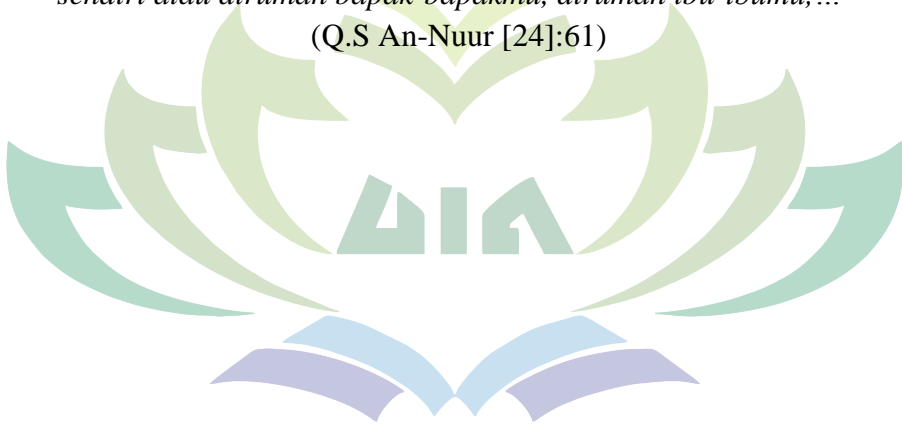
Dr. Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

رِيضٍ عَلَى وَلَا حَرْجٌ إِلَّا عَرَجَ عَلَى وَلَا حَرْجٌ إِلَّا عَمَى عَلَى لَيْسَ
مُ بِيُوتٍ أَوْ بِيُوتِكُمْ مَنْ تَأْكُلُوا أَنْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَا حَرْجٌ أَلَمْ
أَمَّهَتِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ أَبَائِكُمْ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, ...”
(Q.S An-Nuur [24]:61)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutikno dan Ibu Supatmi yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, Do'a serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Adikku tersayang Ifti Alfiya Anaqoh, yang senantiasa memberi dukungan, Do'a dan semangat. Semoga dengan gelar yang telah ku raih, bisa menjadi motivasimu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ellemmia Lorenza Pradana, dilahirkan di Sukasari pada tanggal 13 Januari 1999, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Supatmi. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Darmawanita PT Wachyuni Mandira yang diselesaikan pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 3 Rulung Helok pada tahun 2004-2010. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 4 Natar pada Tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur undangan SPAN-PTKIN. Pada tahun 2016-2018 penulis pernah tinggal di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah meimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inyah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di KPU Kabupaten Pesawaran)”** Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan skripsi ini penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua ProdiHukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yonki Pradikta, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara(Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Bapak Khairuddin, M.S.I Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. KPU Kabupaten Pesawaran yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah dan staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberi dukungan, semangat serta saksi jatuh bangunnya menyelesaikan skripsi ini Puri Retno Mutia, Nurmalita Putri Utari, Firqotus Sa'idah, Siti Mawadah, Annisa Nur Kholifah.
10. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara 2016 kelas A yang telah menjadi bagian cerita dalam kegiatan perkuliahan, terkhusus Hendy Isharyanto, Desti Mayriska Ifani, Ayu Oktaviani, Hepi Septianto, M. Wahyu Islamy terimakasih untuk dukungan dan motivasinya.
11. Latifatul Afifah terimakasih sudah menjadi partner selama pengerjaan skripsi
12. Teman-teman KKN Kelompok 78 Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur
13. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Februari 2021

Ellemmia Lorenza Pradana
1621020042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9
I. Tinjauan Pustaka	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hak Politik dalam Islam.....	15
1. Pengertian fiqh siyasah.....	15
2. Ruang lingkup fiqh siyasah	16
3. Pengertian hak politik.....	18
4. Sejarah hak politik.....	20
5. Macam-macam hak politik	21

6. Dasar hukum hak politik	23
B. Ahliyah (Cakap Hukum dalam Islam)	25
C. Penyandang disabilitas mental	27

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPU Kabupaten Pesawaran.....	35
1. Sejarah Singkat.....	35
2. Visi dan Misi	36
3. Struktur Organisasi.....	37
4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Pesawaran.....	41
B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu 2019	44

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	61
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Blangko Konsultasi Pembimbing
2. Lampiran 2: Surat Izin Riser
3. Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Kabupaten
4. Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian
5. Lampiran 5: Pedoman Wawancara
6. Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”. Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.¹
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²
3. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental adalah proses atau perbuatan memenuhi hak-hak yang diperoleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berpartisipasi dan interaksi dengan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.778.

² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) h.11.

dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.³

4. Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan UUD 1945.⁴
5. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan tentang hak politik penyandang disabilitas secara menyeluruh termasuk hak pilih mereka.⁵
6. KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, yang dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa judul dari skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 yang akan membahas pelaksanaan Hak Politik sebagai bentuk pemenuhan hak asasi setiap warga negara sebagaimana ketentuan UUD 1945.

³ Choirun Nisa, "Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". (Skripsi Program Sarjana Siyasah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h.1.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1)

⁵ Undang-undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....h.1180.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama dengan manusia lain, sehingga dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Mental, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bahkan memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Maka dengan adanya kenyataan seperti ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan ini.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Referensi yang terkait penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah pada program studi Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Kata penyandang dapat diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan kata disabilitas adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *disability* yaitu cacat atau ketidakmampuan.⁷ Namun secara normatif, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸

Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI dalam jurnal ilmiah kesejahteraan sosial Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat. Selanjutnya, Orang Dengan Gangguan Jiwa ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sedangkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/ atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.⁹

Selanjutnya dalam buku karangan Petter Mahmud Marzuki, Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tidak ada satupun yang dapat menduduki posisi sentral dalam hukum perdata kecuali hak. Kiranya memang tepat apa yang telah dikemukakan oleh Meijers tersebut, karena hak merupakan

⁷ Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570>, diakses 22 Desember 2019.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1).

⁹ Yazfinedi, "Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol. XIV No.26 (Juli-Desember 2018), h. 102

sesuatu yang telah melekat pada diri manusia baik dari aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.¹⁰ Argumentasi yang mendasari pernyataan bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Dengan demikian, hak dapat dikatakan satu paket dengan penciptaan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mempunyai aspek fisik dan eksistensialnya. Hak tetap saja ada sebagai bagian dari diri manusia itu sendiri walaupun tidak diakui oleh hukum.¹¹

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat artinya rakyat memiliki hak sepenuhnya untuk dapat memilih secara langsung maupun diwakilkan. Karena hak ada sejak Allah SWT menciptakan manusia. Hal ini berarti setiap manusia memiliki hak tanpa terkecuali penyandang disabilitas mental.

Penyandang disabilitas mental ini pada dasarnya, telah memiliki hak pilih dalam pemilu bukan suatu hal yang baru. Namun Mahkamah Konstitusi telah melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dan selanjutnya hasil uji materi itu tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 yang didasarkan pada UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan dasar hukum diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukumnya berbunyi:

“Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 148

¹¹ *Ibid*, h. 155.

untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya”.¹²

Banyak peraturan yang mengatur diberikannya hak politik atau hak pilih kepada penyandang disabilitas mental ini seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Dalam ayat Al-Qur'an juga banyak yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu,...” (Q.S An-Nuur [24]:61)

Maksud dari ayat di atas yaitu menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan yang bukan penyandang disabilitas.¹³ Kesetaraan sosial yang dimaksud disini ialah seluruh individu maupun kelompok memiliki kesamaan hak untuk memilih dan dipilih, sama dimata hukum, mendapat pendidikan yang layak, jaminan kesehatan dan pengamanan sosial lainnya yang sama melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

¹³ Hafiz, NU Online, <http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islamterhadap-penyandang-disabilitas>, diakses 8 Januari 2020

Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang meragukan suara dari penyandang disabilitas ini karena dianggap membuka peluang terjadinya manipulasi dan diberi arahan untuk memilih satu calon tertentu, karena anggapan masyarakat penyandang disabilitas mental berbahaya dan tidak dapat berfikir secara kritis dalam memilih wakil rakyat dalam pemilu. Mereka juga berasumsi bahwa penyandang disabilitas ini harus dijauhi atau disingkirkan dari lingkungan. Komnas HAM sangat menyayangkan anggapan masyarakat yang seperti ini. Sehingga Hal ini sama dengan diskriminasi terhadap hak yang diperoleh penyandang disabilitas mental ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada implementasi pasal 13 UU Nomor 8 tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 (Studi di KPU Kabupaten Pesawaran) dan melihat tinjauan fiqh siyasah terhadap pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 (Studi di KPU Kabupaten Pesawaran).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk merumuskan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.

G. Signifikansi Penelitian

1. Dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara serta dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.
2. Supaya pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental.
3. Untuk memperluas wawasan penulis serta memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan di

lapangan atau pada responden.¹⁴ Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.¹⁶

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁷ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua KPU dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta keluarga dari penyandang disabilitas mental di Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

¹⁴ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.21.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.9.

¹⁶ Susiadi, *Metodelogi Penelitian....*,h.16.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan. Informan adalah orang dalam pada latar penelitian serta orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia juga berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.¹⁹ Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri atau sifat yang ada dalam populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu diambil 2 dari komisioner, 1 kesekretariatan, dan 5 keluarga dari penyandang disabilitas mental.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari data aslinya. penelitian dalam hal objek yang akan diteliti ataupun dideskripsikan sendiri oleh populasi yang ada pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari responden langsung dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesawaran, dan hasil wawancara dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesawaran serta keluarga penyandang disabilitas mental.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat tidak berkaitan langsung dari sumber asli, melainkan sumber data pelengkap guna memperkuat data yang telah

¹⁸ *Ibid.*, h.120

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 132

diperoleh dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016, buku-buku yang berkaitan, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal, media cetak maupun elektronik, ensiklopedia dan lainnya.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Dokumen yang dapat diambil berupa buku harian, laporan notulen, surat pribadi dan dokumen lainnya.

b. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode pengumpulan data melalui wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, pelengkap teknik pengumpulan lainnya, serta menguji hasil pengumpulan data lainnya.²¹ Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan pihak keluarga disabilitas mental dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesawaran.

5. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya yang diambil setelah semua data terkumpul sesuai kebutuhan yang ditentukan, ialah menghimpun dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data yang sudah diseleksi akan dikelompokkan sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya, dan penyusunan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

²⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologo Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) , h.55

²¹ *Ibid*, h.69

Dalam hal analisis data kualitatif. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan hingga dapat dipahami dan diceritakan kepada orang lain.²²

Tujuan dari analisis data ini yaitu untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru mengenai Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perspektif Fiqh Siyasah yang selanjutnya dapat menjadi rujukan atau memberikan solusi dalam permasalahan.

Kerangka yang diambil dalam menganalisis data ini ialah secara induktif karena agar dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data, membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat menguraikan latar secara penuh dan membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.²³

I. Tinjauan Pustaka

Penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah yaitu berupa skripsi, selama ini belum ada skripsi yang membahas secara detail mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*....h.224.

²³ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*...., h. 5..

Penyandang Disabilitas. Tetapi ada beberapa skripsi terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nissa Nurul Fathia yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Ia membahas tentang bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas secara umum dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramsom dan Haerckwik.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas penyandang disabilitas secara lebih khusus yaitu disabilitas mental.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iskak dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019” Ia membahas tentang bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi disabilitas mental.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas hak politik penyandang difabel mental pada pemilu 2019.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq G Pratama dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Ia membahas bagaimana pemenuhan hak politik terhadap penyandang difabel secara umum di kota Bengkulu.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini membahas tentang

²⁴ Nissa Nurul Fathia, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016)

²⁵ Iskak, “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

²⁶ Taufiq G Pratama, “Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Politik dalam Islam

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu fiqh dan siyasah. Agar dapat dipahami maka perlu dijelaskan maksud atau pengertian dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara etimologi yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara. Dengan kata lain istilah fiqh dari segi bahasa ialah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan secara termonologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya *tafshil*. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran *ijtihad*. Dengan kata lain fiqh diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.²⁷

Selanjutnya, kata siyasah secara etimologi berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengurus, mengatur, serta memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut kata *as siyasah* memiliki arti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pengawasan, pengurusan, perekayasaan, pembuatan kebijakan, dan arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang saling berkaitan: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Maka, *al-siyasah*

²⁷ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.21-22

diartikan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁸

Secara terminologis dalam buku karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada banyak dikemukakan oleh para yuris islam. menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil siyasah adalah “Suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Selanjutnya menurut Husain Fauzy al-Najjar definisi siyasah adalah “Pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.” Dan menurut Ibn Manzhur definisi siyasah adalah “Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”²⁹

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan definisi fiqh siyasah yaitu ilmu tata negara Islam secara lebih khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan syariat, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁰

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam buku Muhammad Iqbal menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha’iyyah* (peradilan),

²⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25-26

²⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 9-10

³⁰ *Ibid*, h.11

siyasah harbiyyah (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter, dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional. Sementara dalam kitab yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* Abd al-Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian, yaitu hubungan internasional, keuangan negara dan peradilan.³¹

Namun, berbeda dengan tiga tokoh diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³²

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), bidang ini meliputi ,kajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*), bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),h.14

³² *Ibid.*, h.15

muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau bisa juga disebut dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), bidang ini mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak, dan perbankan.³³

3. Pengertian Hak Politik

Hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik, kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam al-qur'an terdapat beberapa makna. Seperti makna hak sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam al-qur'an surat Yasin/36, selanjutnya makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan yang terdapat dalam surat al-Anfal/8:8, makna hak sebagai bagian yang terbatas terdapat dalam surat al-Ma'arij/70:24-25, kata hak dengan arti benar, lawan dari batil, terdapat dalam surat Yunus/10:35.16. Dalam kamus bahasa arab hak diartikan sebagai ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar. Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negaranya.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Politik juga adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan

³³ *Ibid.*, h.15-16

mencegah hal-hal yang merugikan dari kepentingan manusia.³⁴

Mengacu pada pengertian tersebut politik yang berasal dari kata *polis* adalah negara bisa yang baik, karenanya setiap negara harus memiliki aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang kekuasaan hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja, dan yang melaksanakan peraturan pemerintah ialah seluruh lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan pemimpin.

Menurut Miriam Budiarto, politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.³⁵ Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi hak politik menurut hukum islam adalah hak-hak warga negara dalam negara islam dimana individu dapat ikut andil dalam melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi

³⁴ Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.178

³⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), h.14

³⁶ *Ibid.* h.17

penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

4. Sejarah hak politik

Sejarah hak politik dalam Islam sudah berlangsung sejak manusia diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat Rasul diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia terjadilah perkembangan politik dalam Islam. Peristiwa ketatanegaraan Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak politik terjadi saat adanya Piagam Madinah.

Dokumen Piagam Madinah adalah sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya, dan dokumen ini telah diakui secara otentik. Isi dari piagam Madinah yang menjelaskan tentang hak atas persamaan di depan hukum pada Pasal 26 sampai Pasal 35. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk kota ini ditinjau dari segi agama terdiri dari empat golongan, yaitu Muslim, Musyrik, Yahudi serta Nasrani. Golongan Muslim terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshor, yang dimaksud kaum Muhajirin adalah imigran dari kota Makkah dan mereka adalah orang-orang suku Quraisy yang telah masuk Islam. Sedangkan kaum Anshor adalah warga asli dari kota Madinah yang terdiri dari dua suku yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Sementara golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Bani Qainuqa', Bani Quraizhah, dan Bani Nadlir. Adapun golongan Nasrani merupakan kelompok minoritas yang umumnya mendiami daerah Najran.³⁷

Dalam sejarah Islam juga terdapat kelompok yang disebut *ahl al-dzimmah* bisa disamakan dengan kelompok minoritas yang dilindungi dan memiliki hak yang sama

³⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.36

dengan kelompok minoritas. *Dzimmah* memiliki beberapa makna yaitu perjanjian, jaminan, tanggungan, dan perlindungan.

Ahl dzimmah dalam sejarah Islam klasik berasal dari golongan-golongan yang bukan muslim dan suku-suku non-Arab lain. Mereka memiliki perjanjian dengan penguasa muslim, yang dijamin hak hidup, milik, beragama, politik dan hak-hak lainnya

Ditinjau dari hukum Islam, hak-hak politik merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Sebagai prinsip dasar, monotaisme merupakan pembebasan yang membawa konsekuensi pada keberadaan seluruh umat manusia dalam kedudukan yang sederajat.

5. Macam-macam Hak Politik

Menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam yaitu:

- a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara;
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul;
- c. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara;
- d. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara;
- e. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR);
- f. Hak untuk memberikan suara.³⁸

Ia tidak menyetujui pengisian jabatan kepala negara dan anggota dewan. Rakyat yang memilih namun ia juga membenarkan jika pengisian jabatan kepala negara maupun anggota dengan jalan pemilihan, ia tidak membenarkan

³⁸ Dudi Badruzaman, "Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.9 No.4 (Maret 2019),h.25

adanya kampanye dan pembentukan kelompok-kelompok atau partai-partai.

Menurut Abd Al-Karim beberapa hak politik yang bisa dinikmati oleh rakyat atau warga negara sebuah komunitas Islam:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara baik langsung maupun perwakilan;
- b. Hak musyawarah atau hak untuk berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif;
- c. Hak memcat atau mencopot dari jabatannya;
- d. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara atau Presiden;
- e. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

Menurut Ali Bahnasawi ada empat macam hak politik yang lain:

- a. Hak untuk mendirikan partai politik guna berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik;
- b. Hak untuk berkoalisi dengan tokoh individu dan partai-partai lain;
- c. Hak untuk berposisi guna menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar;
- d. Hak untuk memperoleh dan suara politik.

Menurut Muhammad Anis Kosom Ja'far hak politik ada tiga macam:

- a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan referendum;
- b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat;
- c. Hak mencalonkan diri menjadi Presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.³⁹

6. Dasar Hukum Hak Politik

³⁹ *Ibid*, h.26

Persamaan hak merupakan suatu jembatan penghubung antar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu kesatuan yang dijadikan dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Oleh sebab itu berlaku adil merupakan sistem Allah SWT dan syariat-Nya.

Nash al-Qur'an dan hukum-hukumnya telah menuturkan dan menetapkan persamaan hak sesempurna-sempurnanya sebagaimana Allah telah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya.

Dalam hukum islam memiliki ketentuan tersendiri dalam memilih dan dipilih. Tanggung jawab dalam melaksanakan hak politik bukan hanya untuk sekelompok individu, keluarga atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ
يُزَكَّى ۚ (٣) أَوْ يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ (٤) أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ۚ (٥)
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۚ (٧) وَأَمَّا مَنْ
جَاءَكَ يَسْعَى ۚ (٨) وَهُوَ يَخْشَى ۚ (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ (١٠) كَلَّا
إِنَّمَا تَذَكَّرُ ۚ (١١)

"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan

diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan” (Q.S.’Abasa[80]:1-11)

Ulama Muffasirin meriwayatkan, turunnya surat ‘Abasa berhubungan dengan salah satu seorang penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang memohon bimbingan mengenai keislaman kepada Nabi Muhammad SAW namun diabaikan. Selanjutnya turunlah surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar tidak mengabaikannya meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan untuk lebih memperhatikannya dari pada pemuka Quraisy. Sejak saat itu Rasul sangat memuliakannya dan menyapanya saat berjumpa. Semakin jelas bahwa dalam islam penyandang disabilitaspun memiliki kesempatan yang sama untuk diperhatikan hak nya dan menerimanya sama dengan manusia lain.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.”(Q.S. al-Fath[48]:17)

Dalam ayat ini seseorang diperbolehkan untuk tidak ikut berperang apabila ada halangan seperti orang buta, pincang serta orang yang sakit berkepanjangan. Dan apabila mereka mau ikut berperang maka Allah SWT akan memasukkan dalam surganya. Dalam ayat tersebut penyandang disabilitas diberi kemudahan supaya mereka keluar dari ketidakpercayaan diri untuk ikut serta berbaur dilingkungan masyarakat seperti menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan lain sebagainya.

B. Ahliyah (Cakap Hukum dalam Islam)

Dalam islam, orang yang terkena *taklif* dianggap mampu melakukan tindakan hukum. Tak heran jika sebagian besar dari ulama Ushul Fiqh berkeyakinan bahwa dasar sanksi hukum bagi seorang mukallaf ialah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dibebani hukum apabila ia berakal sehat dan memahami *taklif* yang ditujukan kepadanya secara baik. Maka bagi seseorang yang tidak mengerti atau tidak berakal dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).

Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa seorang *mukallaf* dapat terkena *taklif* apabila sudah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Orang tersebut mampu memahami *khitbah syar'i* (tuntutan syara') yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung atau melalui orang lain. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami *khitbah syar'i* tidak mungkin dapat melaksanakan suatu *taklif*.

Kemampuan untuk memahami hanya melalui akal manusia dan hanya akal lah yang dapat mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Dapat dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang sulit diukur dan dapat dipastikan bahwa akal manusia berbeda antara satu dengan

lainnya, maka syara' menentukan standar dasar lain sebagai indikasi yang jelas dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi tersebut adalah balighnya seseorang.

2. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum., dalam Ushul Fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Secara bahasa (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan mengenai suatu urusan, sedangkan secara istilah (terminologi) menurut para ahli Ushul Fiqh diantaranya sebagai berikut: “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’”.⁴⁰ *Ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk yaitu:
 - a. *Ahliyyah ada'*, *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapat pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *Ahliyyah ada'* adalah '*aqil, baliq* dan cerdas.
 - b. *Ahliyyah al-Wajub*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mapu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Sebenarnya, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah al-wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *wasi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.⁴¹

C. Penyandang Disabilitas Mental

Istilah penyandang disabilitas inipun mulai muncul pada tahun saat Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar Komunikasi, sosiologi, linguistik, filsafat, komunitas penyandang cacat, unsur pemerintah dan komnas HAM. Dari forum ini tercetus istilah baru, yaitu “*Person With Disability*” digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat.⁴²

Istilah penyandang cacat ini biasa digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Terdapat tiga jenis penyandang disabilitas yaitu: pertama, ialah kelompok yang berkelainan fisik seperti tunarungu dan tunadaksa. Kedua, kelompok yang berkelainan non-fisik seperti tunagrahita dan autis. Ketiga, kelompok yang berkelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis.

Dikutip dari jurnal Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,

⁴¹ Analiansyah, “Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia”, *Conference Proceedings-ARICIS I*, h.198-199

⁴² Akhmad Soleh, *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol III No.1 (Juni 2014). h.7

menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan untuk melakukan fungsi sosial dalam pemenuhan kebutuhan masalah dan kegiatan sehari-hari.

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan disini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, inteligensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya.

Adapun kriteria penyandang disabilitas antara lain:

1. Disabilitas Bersifat Sementara (Temporer)

Disabilitas dalam kategori ini adalah seseorang yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga ia tak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti ini bersifat sementara, namun jika ia tidak memperoleh intervensi yang tepat bisa jadi akan menjadi permanen. Diantara penyandang disabilitas yang bersifat temporer atau sementara ialah:

- a. Seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Mengalami kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya
- c. Mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan dalam belajar,
- d. Seseorang yang mengalami trauma akibat dari bencana yang pernah dialami.⁴³

2. Disabilitas Bersifat Tetap (Permanen)

⁴³ Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h.12

Penyandang disabilitas bersifat permanen ini mengalami hambatan perkembangan yang bersifat internal yang berakibat langsung dari kondisi kecacatannya. Dalam hal ini contohnya saja seperti seseorang yang kehilangan fungsi pengelihatan atau pendengaran dan orang gila yang tidak sembuh-sembuh. Dengan kata lain disabilitas ini disebut juga dengan penyandang cacat.⁴⁴

Dari sini perlu ditegaskan bahwasannya istilah berkebutuhan khusus bukan ungkapan lain dari penyandang cacat, tetapi istilah berkebutuhan khusus sendiri memiliki spectrum yang begitu luas, yaitu meliputi berkebutuhan khusus temporer dan berkebutuhan khusus permanen.

Adapun jenis-jenis disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik ialah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih dari organ tubuh tertentu. Disabilitas fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya, timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu:

- 1) Alat indra fisik, di antara yang berada dalam kondisi ini diantaranya kelainan pada indra pendengaran (tunarungu), dan kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara)
- 2) Alat motoric tubuh atau biasa disebut dengan kelompok tunadaksa. Yang berada dalam kondisi ini diantaranya: kelainan otot dan tulang (poliomyetis), kelainan pada sistem syaraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motoric dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan atau kaki, amputasi, dan lain-lain.

b. Disabilitas Mental

⁴⁴ *Ibid.*, h.13

Disabilitas dalam aspek mental ialah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan dalam aspek ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau biasa disebut dengan subnormal.⁴⁵

Secara umum, karakteristik disabilitas mental dengan kemampuan lebih memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi. Disamping itu, mereka juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu. Kemampuan itu antara lain seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, mampu berpikir kreatif produktif, keahlian dalam salah satu bidang kesenian, kemampuan psikomotorik, dan kemampuan psikososial dan kepemimpinan.

c. Disabilitas Perilaku Sosial

Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain sebagainya. Manifestasi dari mereka dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial, misalnya saja kompensasi berlebihan atau sering bentrok dengan lingkungan. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan di lingkungan sekitarnya, mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri dan juga orang lain disekitarnya. Sehingga dalam kelainan ini perlu diupayakan tindakan pengendalian, baik yang bersifat prefentif, kuratif, represif, maupun perseverasi terhadapnya.⁴⁶

Adapun perbedaan antara disabilitas mental dengan gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a. Disabilitas Mental

⁴⁵ *Ibid.*, h.18

⁴⁶ *Ibid.*, h.20

Dalam pasal demi pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yaitu: pertama, psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Disabilitas dalam aspek mental ialah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan dalam aspek ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau biasa disebut dengan subnormal.

Secara umum, karakteristik disabilitas mental dengan kemampuan lebih memiliki kecerdasan yang tinggi dalam prestasi. Di samping itu mereka juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu. Kemampuan itu antara lain seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, mampu berpikir kreatif produktif, keahlian dalam salah satu bidang kesenian, kemampuan psikomotorik dan kemampuan psikososial dan kepemimpinan.

1) Gangguan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang kemudian disingkat menjadi ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Dari deskripsi di atas sudah jelas antara Disabilitas Mental dengan Gangguan Jiwa tidak ada perbedaannya yaitu sama-sama terganggu fungsi pikiran, perilaku, serta perasaannya yang mengakibatkan ketidak setabilan seseorang dengan lingkungan hidupnya, baik berinteraksi dengan orang lain maupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

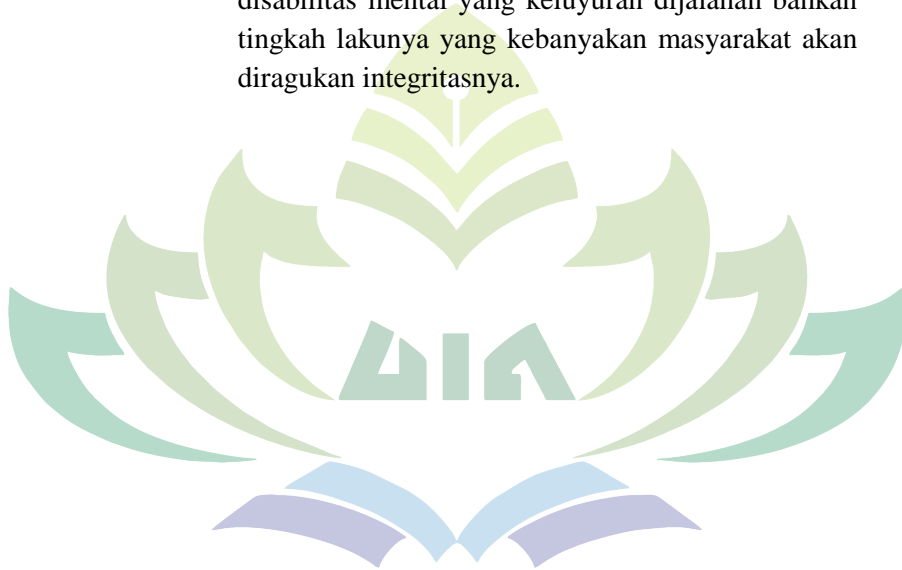
Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan beberapa hak-hak nya yaitu antara lain:⁴⁸

- a) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
- b) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
- c) Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- d) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
- e) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
- f) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
- g) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa;
- h) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

Adapun hak penyandang disabilitas untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT),

⁴⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atas dasar apapun juga. Hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum (*legal policy*) melainkan hak konstitusional.⁴⁹ Namun, ikut sertanya penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini dalam pemilu akan membuat kegaduhan di masyarakat, karena keterlibatan penyandang disabilitas mental akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Menjadi pemilih yang memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk penyandang disabilitas mental yang keluyuran dijalanan bahkan tingkah lakunya yang kebanyakan masyarakat akan diragukan integritasnya.



⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Muin salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995

Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengeal Teori-teori Politik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013

Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

C.S.T .Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini: HAM di Indonesia, 1999, Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat, 1998, Komnas HAM, Kebebasan Pers, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gutara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed Empat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologo Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Penyusunan Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Rakyat Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, Cet. 1

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, , Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema insani Press, 1996.

Jurnal

Akhmad Soleh, *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol III No.1 (Juni 2014)

Analiansyah, “Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia”, *Conference Proccedings-ARICIS I*

Dudi Badruzaman, “Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.9 No.4 (Maret 2019)

Mirza Sahputra, Husni Jalil, Iskandar A. Gani, *Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Volume 3, No.2, 2015

Naskah Ilmiah

Choirun Nisa, “Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. (Skripsi Program Sarjana Siyasah (Hukum Tata

Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017)

Iskak, “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Metty Sinta Oppyfia, “Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No.8 Tahun 2016)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Nissa Nurul Fathia, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016)

Taufiq G Pratama, “Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas

Wawancara

Devi Linda Sari (Keluarga Penyandang Disabilitas Mental),
wawancara dengan penulis, Desa Wiyono, Kecamatan
Gedong Tataan, 22 Desember 2020

Endang sari, (Keluarga Penyandang Disabilitas Mental), wawancara
dengan penulis, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong
Tataan, 22 Desember 2020

Murniati Indah Permata (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Parmas, dan SDM) wawancara dengan penulis, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, 21 Desember
2020

Nurlela (Keluarga Penyandang Disabilitas Mental), wawancara
dengan penulis, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan
Gedong Tataan, 22 Desember 2020

Putri Ramadanti (Kasubbag Program dan Data), wawancara dengan
penulis, KPU Kabupaten Pesawaran, 21 Desember 2020

Rismawati (Keluarga Penyandang Disabilitas Mental), wawancara
dengan penulis, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong
Tataan, 22 Desember

Sumarni, (Keluarga Penyandang Disabilitas Mental), wawancara
dengan penulis, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong
Tataan, 22 Desember 2020

Yatin Putro Sugiono (Ketua KPU Kabupaten Pesawaran),
wawancara dengan penulis, KPU Kabupaten Pesawaran,
21 Desember 2020

Sumber On-Line

“KPU Pesawaran Akan Tambah Kursi Dapil 5” (On-line), tersedia di: <http://m.harianmomentum.com/read/5827/kpu-pesawaran-akan-tambah-kursi-dapil-5> (13 Januari 2021)
Hafiz, NU Online, ahad 19 November 2017,

<http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islamterhadap-penyandang-disabilitas>

Profil KPU Kabupaten Pesawaran 2014

Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570>

